

LAKIP



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada masyarakat, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini disusun mengacu pada pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan pelaksanaan program kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan visi pemerintah Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Yang Berkesinambungan”.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra dapat mencerminkan semua yang telah dicapai Biro Bina Mental dan Kesra serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEPALA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA

Drs. H. SYAHRIL. B, MM
Pembina Utama Muda,
Nip.19580405 197903 1 005

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Biro Bina Mental dan Kesra	3
1.3.1 Tugas Pokok	3
1.3.2 Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Biro Bina Mental dan Kesra	5
1.3.5 Anggaran	8
1.3.6 Inventarisasi Aset	8
1.3.7 Sarana dan Prasarana	9
1.4 Dasar Hukum Penyusunan Lakip	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
2.1 Umum	11
2.2 Strategis	12
2.3 Arah Kebijakan	13
2.4 Program Kegiatan	13
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017	17
2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2017	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017	21
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

BAB I

Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued yang sedang dihadapi organisasi).

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dalam pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan sosial secara optimal, juga perlu dilaksanakan guna mengeliminasi berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dipandang sebagai bentuk interaksi dan dinamisasi sosial kemasyarakatan dan sangat diperlukan penanganan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat membutuhkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganannya, antara lain dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga, yang tentunya akan melibatkan stakeholders yang relatif besar, mengingat besarnya lingkup tugas bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.

Disamping itu, sebagai daerah yang memiliki kekuatan adat dan budaya yang dilatarbelakangi oleh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka pembangunan adat, budaya serta agama sangat membutuhkan penanganan yang sinergis dengan berbagai unsur.

Biro Bina Mental dan Kesra merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2012 dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Mandiri wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai wujud pertanggungjawaban atas produktivitas kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2015.

Biro Bina Mental dan Kesra adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra. Disamping itu, Biro Bina Mental dan Kesra di pimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan Bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.

Program kegiatan yang dilaksanakan Biro Bina Mental dan Kesra selama tahun 2017 di dasarkan atas tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021, Rencana Strategis Biro Bina Mental dan Kesra Tahun 2017-2021, Rencana Kinerja Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017, secara konsisten terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LAKIP ini semata-mata ditujukan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa Biro Bina Mental dan Kesra mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berorientasi pada hasil baik berupa output maupun outcomes. Disamping itu penyusunan LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 juga merupakan perwujudan prinsip transparan dan akuntabilitas yang merupakan aspek dan pilar penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Bina Mental dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibuat sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Biro Bina Mental dan Kesra. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi Biro Bina Mental dan Kesra dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial, keagamaan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan dan pemuda dan olahraga.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Bina Mental dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a) Sebagai sarana untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder.
- b) Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Biro Bina Mental dan Kesra

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Bina Mental dan Kesra merupakan unit SKPD yang langsung berada di bawah Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan pengoordinasian, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Biro Bina Mental dan Kesra mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;
- b) Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;
- c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub No. 68 Tahun 2017 tentang

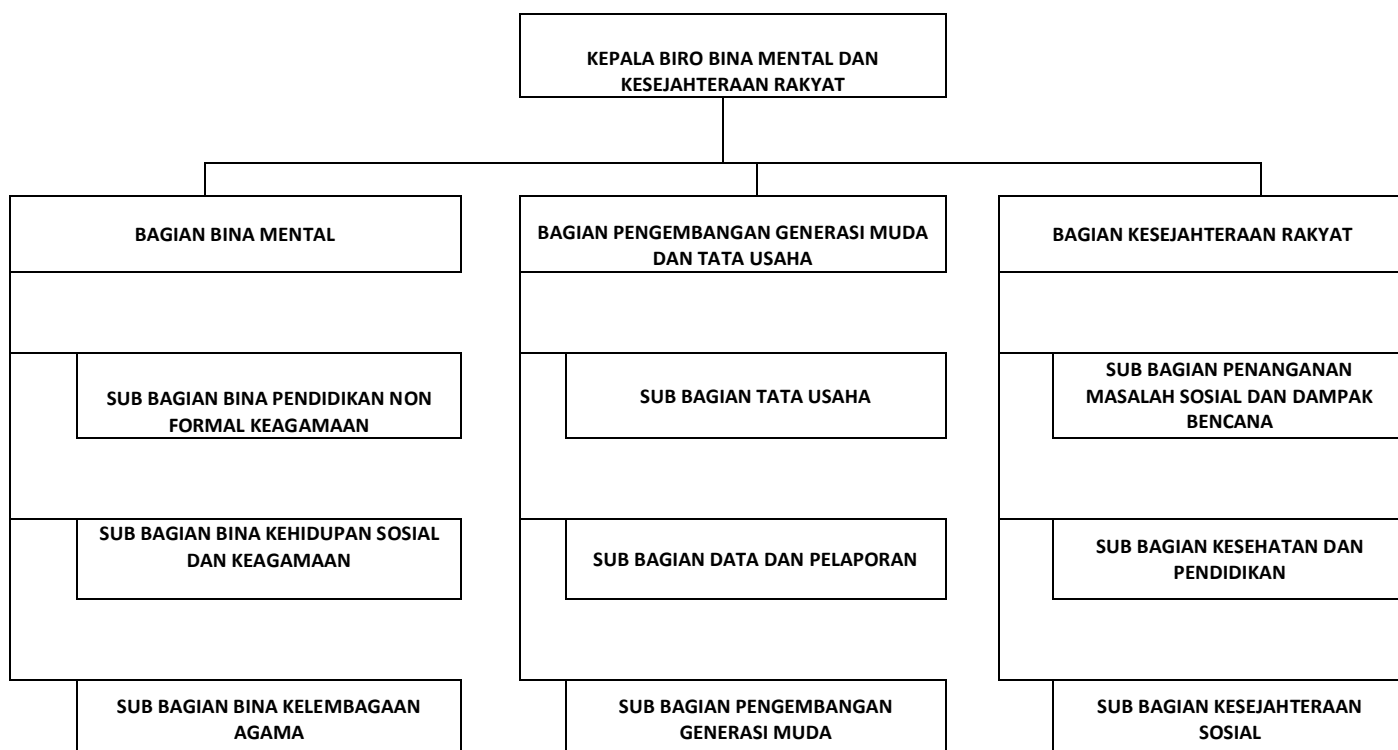
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Biro Bina Mental dan Kesra dibentuk dengan struktur :

1. Kepala Biro,
2. Bagian Bina Mental terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Pendidikan Non Formal Keagamaan
 - b) Sub Bagian Bina Kehidupan Sosial dan Agama
 - c) Sub Bagian Bina Kelembagaan Agama
3. Bagian Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Pengembangan Generasi Muda
 - c) Sub Bagian Data dan Pelaporan
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial dan Dampak Bencana
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Biro hingga Kepala Sub Bagian pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan. Struktur Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Bina Mental dan Kesra

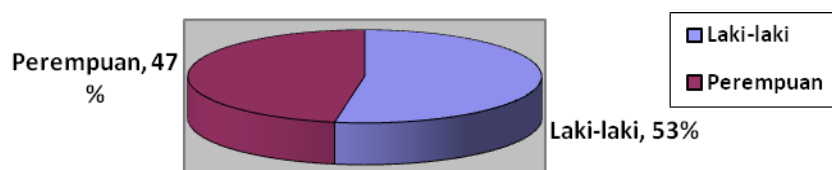


1.3.4 Sumber Daya Biro Bina Mental dan Kesra

1.3.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra berjumlah 55 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 29 orang (52.46%) laki-laki dan 26 orang (47.54) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan hampir seimbang dan hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Komposisi Pegawai Biro Bina Mental dan Kesra berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar Tahun 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	19	36%
3	DIPLOMA III/D-3	6	10%
4	STRATA 1	21	38%
5	STRATA 2	9	16%
6	STRATA 3	-	0%
	JUMLAH	55	100%

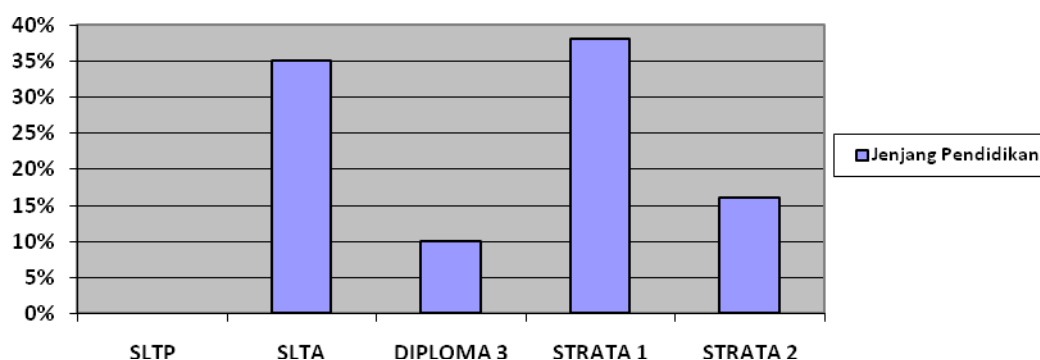
Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Bina Mental dan Kesra karena lebih dari 64% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 36% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompokkan lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara

grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah :

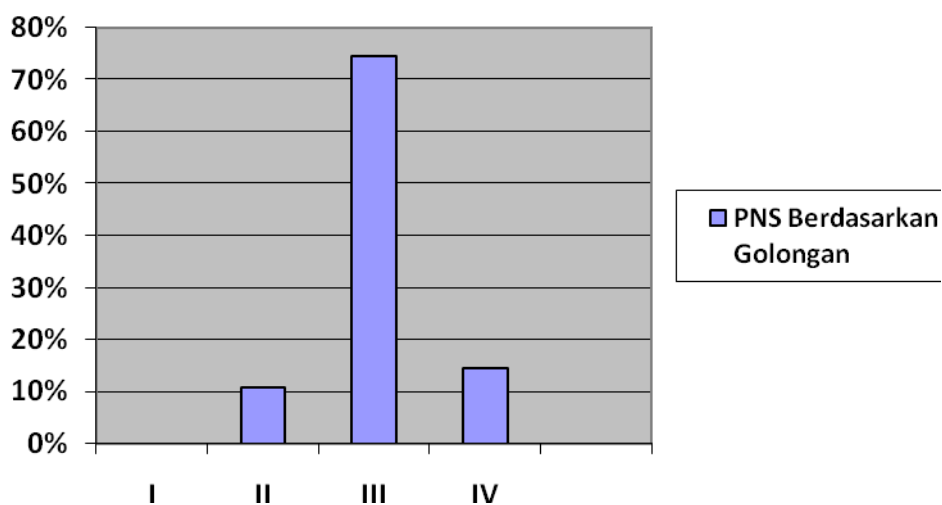
Tabel. 1.2
Daftar Golongan Pegawai
Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar Tahun 2015

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	10,90%
3	Golongan III	41	74,54%
4	Golongan IV	8	14,54%
	Jumlah	55	

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, ternyata 68.85% pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per golongan :

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Biro Bina Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

1.3.5 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 26.983.661.485,- .

1.3.6 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang miliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Biro Bina Mental dan Kesra per Desember 2017 sebesar Rp. 368.935.330.765,-, besaran aset yang dikelola per Desember 2017 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Aset Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar
Per Desember 2017

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
				PERSIL	VOL/ JUMLAH		
1	01		GOLONGAN TANAH				93.678.840.000,-
		01	Tanah	2	75.490	93.678.840.000,-	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				174.274.675,-
		02	Alat-alat Besar	-	1	17.940.000,-	
		03	Alat-alat Angkutan	-	3	62.755.875,-	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	201	75.209.000,-	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	5	18.369.800,-	

4	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				268.385.326.234,-
		00	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34	2.600	268.385.326.234,-	
TOTAL HARGA							362.238.440.909,-

Sumber : Kartu Inventaris Barang Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

1.3.7 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih memakai fasilitas ruangan aula kantor Gubernur.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional dengan status pinjam pakai.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah :

- **BAB I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2017, dasar hukum dan sistematika penulisan LAKIP.
- **BAB II** – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2017-2021, RKT, PK Tahun 2017.
- **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV** – Penutup, menjelaskan simpul menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementasi Biro Bina Mental dan Kesra 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Bina Mental dan Kesra, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja

2.1 Umum

Visi : “Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan yang Berkesinambungan”.

Misi : 1. Terwujudnya pelayanan terbaik dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.
2. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais.
3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk memperkuat keberadaannya di masyarakat
4. Meningkatnya pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

- Sasaran** :
1. Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan
 2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
 3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan
 4. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
 5. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

2.2 Strategi

Strategi yang disiapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Bina Mental dan Kesra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya.
3. Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan.
4. Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan

2.3 Arah Kebijakan

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Biro Bina Mental dan Kesra adalah :

1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
4. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan.
5. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah.
6. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.
7. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan.
8. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
9. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan.
10. Peningkatan kompetensi pemangku adat.
11. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat.
12. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial.
14. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan social
15. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan

2.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- e. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.

Program ini mempunyai kegiatan,:

- a. Kebijakan di Bidang Pendidikan

6. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS
- c. Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- d. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- e. Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana.
- f. Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial.
- g. Kebijakan Penanganan Masalah Sosial

7. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.
- b. Biaya Operasional Masjid Raya Sumatera Barat.

8. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan.
- c. Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.
- e. Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah, Musafir/Mufasirah, Hafiz/Hafizah Sumatera Barat.
- f. Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat dalam Rangka STQ Nasional.
- g. Musabaqah Qiraatil khutub tingkat nasional
- h. Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat.

9. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan se Sumbar.
- b. Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.
- c. Kegiatan Pelatihan Guru-guru TPQ/MDT se Sumbar.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumatera Barat.
- e. Kegiatan Pelatihan Imam Masjid se Sumatera Barat

10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepemudaan di Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga/Organisasi Kepemudaan di Sumatera Barat

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik dan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk yang mendaftar dan mendapatkan porsi berangkat haji.
2.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat yang dikelola badan amil zakat. • Sekolah boarding school bernuansa islam (baru). • Manajemen pondok pesantren dan sekolah agama (baru) • Persentase penyaluran zakat, infak dan sedekah.
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan lama sekolah
4.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat
5.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan lama sekolah
5	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Miskin - Komunitas Adat Terpencil - Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2017, Rencana Kinerja Tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
Biro Bina Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	1. Jumlah Jemaah Haji yang terlayani	3.596 Orang
2.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	1. Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya.	6 %
		2. Peringkat Sumatera Barat pada STQ Nasional Tahun 2017	Peringkat 10
		3. Jumlah tenaga Pendidik Pondok Al-Qur'an yang telah ditingkatkan kompetensinya sesuai standar Nasional	45 Orang
3.	Peningkatan kualitas guru-guru TPQ/MDT	1. Jumlah guru TPQ/TPQA yang dilatih	95 Orang
4.	Meningkatnya pengetahuan pemangku adat tentang pola pewarisan, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	1. Jumlah pemangku adat yang telah mengikuti pelatihan	360 Orang
5.	Meningkatnya peran lembaga adat (KAN) yang aktif	1. Jumlah lembaga adat (KAN) yang aktif.	33 KAN
6.	Optimalisasi koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumberdaya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif	1. Jumlah hasil rumusan rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	4 Rumusan

2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6
2	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	10
		2. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	10
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M a. Kab/ Kota b. Kecamatan	55 30
		2. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	95
4.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	1. Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp. 21.502.832.198,-	APBD
2.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	Rp. 2.163.623.255,-	APBD
3.	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Rp. 251.773.778,-	APBD
4.	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Rp. 628.221.619,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 24.546.450.850,-	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam membangun kinerja disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normative organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja.

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 5 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

4. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
5. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2017 yang terdapat pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2017 sesuai dengan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6	6.26	104%
2	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	10	-25	-250%
		2. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	10	-11	-111%
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M	55	94,73	172%
		a. Kab/ Kota	30	70,39	234%
		b. Kecamatan			
		2. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	95	95	100%
4.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	1. Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

✚ **Sasaran 1** : Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan

Indikator 1 : Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.

Persentase Penduduk yang Mendaftar dan Mendapat Porsi Keberangkatan Ibadah Haji ditargetkan sebesar 6 % diukur berdasarkan besaran jumlah calon Jemaah Haji yang telah mendapat porsi keberangkatan pada tahun ke n (2017) adalah sebesar 4689 orang dibagi jumlah penduduk yang terdaftar tapi belum diberangkatkan sampai tahun ke n-1 (2016) adalah sebesar 74869 orang dengan atau besaran realisasi adalah sebesar 6,26%.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Porsi keberangkatan Haji Tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk mendaftar Haji belum berangkat Tahun n-1}} \times 100\%$$

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, yang kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang, yang dapat digambarkan pelaksanaannya sebagaimana dibawah ini

Pelayanan kepada calon Jemaah Haji baik itu pada pemberangkatan maupun pemulangan Jemaah Haji merupakan suatu hal yang mutlak dan penting. Kepuasan terhadap suatu pelayanan merupakan hal yang didambakan oleh penerima layanan, apalagi memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini kepada calon Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makah baik mulai dari sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah haji sampai dengan pemulangan. Kepuasan tersebut sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pelayanan yang diberikan tentunya semakin tinggi tingkat kepuasan dari pemakai layanan.

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan dari mulai keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah sampai dengan pemulangan antara lainnya seperti

pelayanan kesehatan, konsumsi selama masa calon jemaah di inapkan sebelum keberangkatan, perlengkapan ibadah haji, pengecekan paspor keberangkatan, akomodasi selama pelaksanaan haji, bimbingan selama ibadah haji dan lainnya sampai dengan pemulangan, merupakan layanan yang berhak didapatkan oleh jemaah haji. Hal-hal tersebut setiap tahunnya di usahakan ada peningkatan kualitas terhadap pelayanannya. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kepuasan terhadap layanan yang diberikan, tingkat kepuasan terhadap layanan ini dapat dilihat dari jumlah keluhan yang tertangani maupun jumlah keluhan yang belum tertangani.

Dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya kinerja ini adalah kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang, dengan rincian pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan dibawah ini.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai koordinator pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Bandar Internasional Minangkabau Sumatera Barat.

Jumlah jemaah haji yang dilayani melalui Embarkasi dan Debarkasi Bandar Internasional Minangkabau Sumatera Barat Tahun 2016 total sebanyak 4929 orang calon jemaah haji yang terdiri dari 3631 Orang dari Sumatera Barat dan 1298 orang calon jemaah dari Bengkulu. Jemaah haji yang dilayani melalui Embarkasi dan Debarkasi Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat.

Embarkasi Padang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dengan SK Nomor 20 tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Desember 2006. Embarkasi Padang dalam melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah calon haji dari Tanah Air ke Tanah Suci telah memasuki tahun ke sembilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Embarkasi Padang sudah 10 (sepuluh) kali melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara, maka jemaah haji Provinsi Bengkulu tidak lagi menginap di Asrama Haji Embarkasi Padang. Jemaah haji Provinsi Bengkulu hanya transit di Bandara Embarkasi Padang kemudian melanjutkan penerbangan ke Madinah.

Embarkasi Padang dalam memberangkatkan jemaah haji bertekad untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi kepuasan jemaah haji serta menerima masukan yang berguna bagi peningkatan kualitas Embarkasi Padang

baik dari jamaah, petugas dan elemen masyarakat lainnya. Berkat kerjasama yang baik dengan semua pihak, alhamdulillah pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh segenap stake holder pada tahun ke sepuluh pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun ini Embarkasi Padang telah sukses melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dengan baik dan mendapat apresiasi yang positif dari berbagai pihak.

❖ **Pemberangkatan**

Embarkasi Padang pada tahun ini memberangkatkan jamaah calon haji dan petugas kloter terdiri dari 11 kloter dengan jumlah 4.937 orang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat 3.596 orang dan Provinsi Bengkulu 1.286 orang dan petugas kloter sebanyak 55 orang (TPHI 11 orang, TPIHI 11 orang dan TKHI 33 orang), seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Embarkasi Padang
Tahun 1436 H/2016 M

No.	Provinsi	Jumlah Kloter	Jemaah Haji	Petugas Kloter			Jumlah
				TPHI	TPIHI	TKHI	
1.	Sumatera Barat	13	4.629	12	12	36	4.689
2.	Bengkulu	4	1.628	4	4	12	1.648
Jumlah		17	6.257	16	16	48	6.337

Sumber : Bagian Agama Biro Bina Sosial

Tabel. 2
Jumlah Calon Jemaah Haji Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin dan Usia Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Embarkasi Tahun 1438 H/2017 M

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Pria	2.541	40,51
2.	Wanita	3.716	59,39
Jumlah		6.257	100,00

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentasi (%)
1.	SD	1.498	23,94
2.	SLTP	677	10,82

3.	SLTA	1.697	27,12
4.	D1/D2/D3/SM	580	9,27
5.	S1	1.476	23,59
6.	S2	305	4,87
7.	S3	15	0,24
8.	Lain-lain	9	0,14
Jumlah		6.257	100,00

c. Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentasi (%)
1.	00 s.d 10 tahun	0	0,00
2.	11 s.d 20 tahun	3	0,05
3.	21 s.d 30 tahun	45	0,72
4.	31 s.d 40 tahun	224	3,58
5.	41 s.d 50 tahun	1.100	17,58
6.	51 s.d 60 tahun	2.498	39,92
7.	61 s.d 70 tahun	1.793	28,66
8.	71 s.d 80 tahun	518	8,28
9.	81 s.d 90 tahun	72	1,15
10.	91 tahun lebih	4	0,06
Jumlah		6.257	100,00

Fase pemberangkatan jemaah haji, dimulai tanggal 09 s.d 24 Agustus 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Gelombang I :
 Kloter 1 - 13
 Pemberangkatan : 28 Juli s.d 11 Agustus 2017
 Rute : Padang-Madinah-Makkah-Jeddah-Padang
2. Gelombang II :
 Kloter 14 - 17
 Pemberangkatan : 12 s.d 15 Agustus 2017
 Rute : Padang-Jeddah-Makkah-Madinah-Padang

Setiap jamaah calon haji yang akan berangkat diinapkan terlebih dahulu satu malam di Asrama Haji Embarkasi Padang dan mendapat konsumsi 3 kali makan dan 2 kali snack kecuali jamaah haji asal Provinsi Bengkulu karena jamaah haji Provinsi Bengkulu hanya transit di Bandara Embarkasi Padang.

Jamaah calon haji Embarkasi Padang pada setiap kloter dilepas secara resmi oleh pejabat pemerintah daerah dan PPIH Embarkasi Padang yang dipusatkan di Aula Utama Asrama Haji Embarkasi Padang dan di Bandara Internasional Minangkabau. Jamaah calon haji Embarkasi Padang diangkut menuju Tanah Suci dengan menggunakan jenis pesawat Boing 747 Seri 400 dengan kapasitas 455 seat. Realisasi penerbangan pemberangkatan jamaah calon haji Embarkasi

Padang sebanyak 11 kloter semuanya Alhamdulillah dapat berjalan lancar sesuai rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel. 3
Realisasi Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Embarkasi Padang
Tahun 1438 H/2017 M

Kloter	Perkiraan (WIB)	Realisasi (WIB)	Cepat (menit)	Tepat (menit)	Lambat (menit)
1	10.30	10.25	5	-	-
2	14.25	14.46	-	-	21
3	13.30	13.03	27	-	-
4	02.15	02.20	-	-	5
5	03.05	02.52	13	-	-
6	10.15	09.35	40	-	-
7	03.05	02.34	31	-	-
8	09.50	09.40	10	-	-
9	15.15	14.57	18	-	-
10	14.15	13.36	39	-	-
11	13.25	13.06	19	-	-
12	19.05	18.56	9	-	-
13	10.15	10.02	13	-	-
14	19.35	19.31	4	-	-
15	19.35	19.33	2	-	-
16	05.05	04.50	15	-	-
17	01.00	01.15	-	-	15

Keterangan :

1. Cepat : 14 kali
2. Tepat waktu : -
3. Lambat : 3 kali

❖ **Pemulangan**

Pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang ke Tanah Air dimulai dari tanggal 6 September s.d 25 September 2017. Adapun jumlah jemaah haji dan petugas kloter Embarkasi Padang yang akan pulang berjumlah 6.309 orang yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat 4.612, Bengkulu 1.617 dan petugas kloter sebanyak 80 orang (TPHI 16 orang, TPIHI 16 orang dan TKHI 48 orang), seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 5
Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Padang
Tahun 1438 H/2017 M

No.	Provinsi	Jumlah Kloter	Jemaah Haji	TPHI	TPIHI	TKHI	Jumlah
1.	Sumatera Barat	13	4.612	12	12	36	4.672
2.	Bengkulu	4	1.617	4	4	12	1.637

Jumlah	17	6.229	16	16	48	6.309
---------------	----	-------	----	----	----	-------

Jemaah haji Embarkasi Padang yang wafat selama di Tanah Suci berjumlah 28 orang dengan perincian jemaah haji Provinsi Sumatera Barat 17 orang dan jemaah haji Provinsi Bengkulu 11 orang.

Pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 1438 H/2017 M ke Tanah Suci dimulai tanggal 6 September s.d 25 September 2017, dengan realisasi jadwal pemulangan jemaah haji sebagai berikut:

Tabel. 6
Realisasi Data Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Padang
Tahun 1438 H /2017 M

Kloter	Perkiraan (WIB)	Realisasi (WIB)	Cepat (Menit)	Tepat (Menit)	Lambat (Menit)
1	06.05	06.53	-	-	48
2	08.15	10.03	-	-	108
3	06.05	06.41	-	-	36
4	18.25	19.13	-	-	48
5	18.25	19.15	-	-	50
6	02.25	02.46	-	-	21
7	23.55	00.49	-	-	54
8	06.45	07.17	-	-	32
9	09.15	09.42	-	-	27
10	08.15	08.07	8	-	-
11	06.05	10.12	-	-	247
12	10.45	11.47	-	-	62
13	02.25	02.46	-	-	21
14	14.10	14.50	-	-	40
15	13.10	13.45	-	-	35
16	20.45	20.45	-	√	-
17	19.35	19.43	-	-	8

Keterangan :

1. Cepat : 1 Kali
2. Tepat waktu : 1 Kali
3. Lambat : 15 Kali

Pada fase pemulangan ini keterlambatan berkisar antara 8 menit sampai dengan 247 menit yang disebabkan alasan teknis dan operasional di Bandara King Abdul Azis Jeddah dan Bandara AMMA Madinah.

A. Permasalahan

Dalam operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1438 H/2017 M, kami menyadari masih terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Walaupun secara prinsip masalah tersebut tidaklah menjadi halangan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji dan mensukseskan penyelenggaraan operasional haji di Embarkasi Padang tahun 1438 H/2017 M.

1. Kondisi di Asrama Haji

Secara umum kondisi asrama haji Embarkasi Padang secara umum cukup representative dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Tetapi masih terdapat permasalahan yang ditemui dilapangan diantaranya selasar yang menghubungkan antar gedung belum cukup memadai, karena sewaktu hari hujan jemaah haji agak kesulitan melakukan aktivitas baik menuju Mesjid, ruang makan dll. Kemudian ketika fase pemulangan jemaah haji beberapa fasilitas di Asrama Haji seperti Mesjid dan pagar dibongkar karena dilakukan renovasi. Hal ini dilakukan karena mengingat batas waktu penyelesaian pekerjaan sudah mendekati akhir tahun. Tetapi secara prinsip hal ini tidak terlalu mengganggu pelayanan kepulangan jemaah haji karena waktu fase pemulangan, jemaah haji tidak menginap di Asrama Haji dan hanya transit sebentar untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke daerah asal jemaah haji.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) pada operasional penyelenggaraan haji tahun 1438 H/2017 M secara umum sudah cukup dan memadai. Tetapi masih terdapat SDM yang belum terlalu memahami tugas pokok dan fungsinya.

3. Permasalahan Terkait Dengan Jemaah Haji

Permasalahan yang terkait dengan jemaah haji pada operasional penyelenggaraan haji tahun 1438 H/2017 M yang cukup menonjol adalah ketika hujan, jemaah haji sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan kurang memadainya selasar penghubung antar gedung. Sehingga jemaah haji terkena langsung air hujan ketika melakukan aktivitas, hal ini dikuatirkan akan berdampak terhadap kesehatan jemaah haji. Disamping itu masih terlihat jemaah haji yang keluar pagar asrama dengan berbagai alasan meskipun sudah dilarang oleh petugas.

4. Permasalahan Lainnya Yang Mungkin Muncul

Permasalahan yang timbul terkait dari sebab-sebab lainnya pada operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1438 H/2017 M diantaranya adanya pengunjung yang tidak memakai tanda pengenal yang masuk ke areal asrama haji. Hal ini jika dibiarkan bisa berdampak kepada keamanan barang bawaan jemaah haji dan juga hal ini akan memancing pengunjung lainnya untuk masuk ke dalam areal asrama haji.

B. Pemecahan Masalah/Solusi

Adapun alternative pemecahan permasalahan yang sudah dilakukan sehubungan dengan kendala yang ada pada operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1438 H/2017 M adalah sebagai berikut :

1. Kondisi di Asrama Haji

Terkait selasar yang menghubungkan antar gedung belum cukup memadai, PPIH menyarankan kepada pihak UPT Asrama Haji untuk menyediakan fasilitas selasar penghubung yang lebih representative. Kemudian jika terjadi hujan lebat, PPIH menyarankan jemaah untuk memakai payung, tidak memaksakan diri menempuh hujan dan bahkan PPIH menyediakan bus yang bisa memfasilitasi jemaah. Terkait Masjid yang direnovasi ketika fase pemulangan jemaah, pihak UPT Asrama Haji menyediakan aula yang berfungsi sebagai masjid. Adapun terkait pagar Asrama Haji yang dibongkar, PPIH menyarankan pihak UPT Asrama Haji memasang tali pengaman dan PPIH Bidang Keamanan untuk lebih memaksimalkan pengamanan di gerbang utama dan di lokasi pembongkaran pagar.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Untuk meningkatkan pemahaman panitia terhadap tugas pokok dan fungsinya, perlu kiranya dilakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi panitia serta membuat buku panduan uraian tugas panitia.

3. Permasalahan Terkait Dengan Jemaah Haji

Terkait dengan kurang memadainya selasar penghubung antar gedung, jika turun hujan PPIH menyarankan jemaah untuk memakai payung, tidak memaksakan diri menempuh hujan dan bahkan PPIH menyediakan bus yang bisa memfasilitasi jemaah. Adapun terkait masih ada jemaah haji yang keluar

pagar asrama dengan berbagai alasan, PPIH menghimbau kepada jemaah haji tidak lagi keluar asrama haji karena hal tersebut cukup beresiko bagi jemaah haji. Disamping panitia juga memperketat penjagaan di pintu gerbang asrama haji.

4. Permasalahan Lainnya Yang Mungkin Muncul

Pengunjung yang tidak memakai tanda pengenal akan dipanggil oleh pihak keamanan dan diintograsi. Bagi pengunjung yang ada kepentingan ingin masuk ke dalam areal asrama haji, bisa mengajukan permohonan kepada panitia dan setelah disetujui maka akan diberikan izin masuk atau tanda pengenal masuk ke asrama haji, dengan catatan tanda pengenal tersebut diberi foto dan nama serta tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain.

🚩 **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Indikator 1 : Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).

Zakat/wakaf/sedekah merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan ajaran agama, khusus Islam. Meningkatnya jumlah umat Islam yang membayar Zakat/wakaf/sedekah merupakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dilaksanakan sedangkan wakaf/infak/sedekah merupakan amalan sunat, namun tidak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan iman dan taqwa Umat Islam yang merupakan mayoritas masyarakat Sumatera Barat.

Target Kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya untuk dapat dicapai dengan peningkatan capaian sebesar 10% pada tahun 2017.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya diukur dari persentase kenaikan zakat, infak, sedekah yang diterima Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016.

Tabel 3.6
Perbandingan Penerimaan Zakat
Baznas Provinsi Sumatera Barat

TAHUN				
2013	2014	2015	2016	2017
5.698.039.385,-	6.787.766.928,-	7.463.013.735,-	11.149.385.130,-	8.337.795.697,-

Dari tabel di atas terlihat saldo akhir penerimaan zakat tahun 2017 sebesar Rp. 8.337.795.697,- dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun 2016 Rp. 11.149.385.130,- dengan selisih kurang sebesar Rp. 2.811.589.433,-. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat lainnya tidak tercapai, dengan kekurangan dari target capaian 10% mencapai 250% kekurangannya dari target.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah peningkatan pengumpulan zakat Tahun } n}{\text{Target} \times \text{Jumlah pengumpulan zakat Tahun } n-1} \times 100\%$$

Faktor yang mengakibatkan penurunan pengumpulan zakat ini salah satunya oleh perubahan organisasi perangkat daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini mengakibatkan penggabungan beberapa urusan yang tentunya mengakibatkan perampingan struktur bahkan penggabungan pada OPD tertentu. Dengan perampingan struktur tentunya mengakibatkan berkurangnya jabatan struktural yang sebelumnya ada, dengan pengurangan tersebut tentunya akan memberikan dampak penurunan penerimaan zakat. Karena dengan perampingan struktur tadi yang mengakibatkan berkurangnya pegawai yang menduduki jabatan, yang tentunya akan mempengaruhi penerimaan zakat.

✚ **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Indikator 2 : Persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Peran zakat sebagai sektor sosial ekonomi Islam penting diartikulasikan sebagai solusi untuk mewujudkan keamanan hidup perorangan dan tercapainya kenyamanan sosial dalam batas yang wajar. Dalam Islam, setiap orang harus dapat menikmati hidup secara layak sebagai manusia. Dalam standar minimal, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Siapapun tidak boleh dibiarkan, walau pun non-muslim, hidup menggelandang tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarga.

Peruntukan zakat berdasarkan petunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi, secara eksplisit mengarah pada perlindungan keamanan individu dan masyarakat sesuai *maqasyid syariah*. Masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh rasa aman dan makmur sebagai dampak positif redistribusi kekayaan secara adil melalui zakat, infak dan sedekah. Hadis yang sering dikutip oleh para juru dakwah ketika menguraikan komitmen Islam pada keadilan sosial ialah, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya muslim mengeluarkan hartanya seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang miskin. Dan kesengsaraan orang miskin adalah akibat perilaku orang kaya. Ketahuilah, sungguh Allah akan meminta pertanggung-jawaban orang-orang kaya macam itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."* (HR Thabrani)

zakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Jika dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik, ia meyakini zakat dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Tingkat capaian yang ditargetkan untuk indikator persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah sebesar 15% dibandingkan tahun lalu (2016). Jumlah Zakat, sedekah dan infaq yang disalurkan untuk tahun 2016 adalah sebesar 8.263.374.012,- dan penyaluran tahun 2017 sebesar 6.879.754.539,- jadi persentase jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah mengalami penurunan sebesar Rp 1.383.619.473,- atau sebesar -111,62% dari target yang direncanakan

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah peningkatan penyaluran zakat Tahun } n}{\text{Target} \times \text{Jumlah penyaluran zakat Tahun } n-1} \times 100\%$$

Penurunan penerimaan maupun pengumpulan zakat ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyaluran zakat itu sendiri. Karena sesuai dengan ketentuannya bahwa zakat yang dapat disalurkan kembali adalah sebanyak 87,5% dari total pengumpulan, karena 12,5% merupakan hak amil zakat.

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Indikator : Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M


Sebagai Pembina, Koordinator dan pelaksana program UKS di daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pusat, provinsi dan Kab/Kota merupakan fungsi dari Tim Pembina UKS Kab/Kota. Sedangkan tugas yang harus dilaksanakan oleh TP UKS Kab/Kota adalah :

1. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, sarana dan prasarana, SDM dan Dana
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan TP UKS Kecamatan dan sekolah
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang UKS dengan instansi di daerah yang secara fungsional memiliki keterkaitan kerja.
5. Melakukan rapat kerja minimal 1 kali setahun

Indikator penguatan TP UKS Kab/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan TP UKS dengan SK Bupati atau Walikota
2. Pembentukan sekretariat TP UKS beserta kelengkapan sarana prasarana
3. Keterlibatan lintas sector dalam UKS
4. Dukungan dana dari APBD
5. Ada program dan kegiatan
6. Pembinaan ke TP UKS Kecamatan secara berkesinambungan
7. Dokumen pelaksanaan kegiatan
8. Pelaporan tahunan pelaksanaan pembinaan

Dari indikator dan tugas yang harus dilaksanakan oleh TP UKS tadi dapat diukur tingkat keaktifan sebuah TP UKS. Berdasarkan hal tersebut sampai saat ini dapat dihitung kategori cukup, baik dan sangat baik adalah sebanyak 18 kab/kota dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat atau 57,8% dan untuk TP UKS Kecamatan sebanyak 126 TP UKS Kecamatan atau sebesar 70,39%.

 **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Indikator 2 : Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih

Pembinaan terhadap anak-anak maupun remaja untuk mencintai Al Qur'an di Sumatera Barat belakangan ini sangatlah tinggi, ini dibuktikan melalui data yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah lembaga TPQ dan MDTA bahkan untuk daerah kepulauan mentawai juga mengalami pertumbuhan jumlah TPQ dan MDTA, hal ini seharusnya dibarengi oleh peningkatan kualitas pengajar dalam hal ini kualitas guru yang mengajar. Oleh karena itulah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat Tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagi pada kota padang tanggal 8 s/d 10 Maret 2017 dan dua kali kegiatan mentawai di Sikakap tanggal 24 s/d 26 Maret 2017 di Siberut 13 s/d 15 April 2017 dengan jumlah peserta berjumlah 95 orang. Pelaksanaan di padang sebanyak 55 orang dan pelaksanaan mentawai sebanyak 40 orang 20 orang masing-masing lokasinya.

✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

Indikator 2 : Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap tahunnya di Biro Bina Mental dan Kesra bertujuan untuk menghimpun serta mencarikan jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Melalui rapat koordinasi biasanya tercipta suatu konklusi pengambilan kebijakan baik kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada maupun antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul.

Rakor yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental dan Kesra antara lain :

1. Rakor bidang kesejahteraan masyarakat.
2. Rakor penanganan masalah sosial.
3. Rakor penanggulangan HIV dan AIDS

Setiap hasil rakor telah disampaikan ke Kab/kota untuk dilaksanakan. Dan telah dilaksanakan juga monitoring terhadap hasil rakor, dan melalui monitoring dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rumusan hasil pelaksanaan rakor.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan Program Kegiatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan Sosial (100%) meliputi :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Input : Dana (Rp. 620.522.500,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 597.368.883,- (96.27%).

Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2016 dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya pemahaman dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (100%).

- b. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat

Input : Dana (Rp. 150.000.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 131.027.815,- (87.35%).

Output : Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya Pemahaman Tim Pembina Dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS di Provinsi Sumatera Barat (100%).

- c. Kegiatan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Input : Dana (Rp. 29.858.868,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 27.437.335,- (91.89%).

Output : Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi dan fasilitasi bidang dengan realisasi 100 %.

Outcomes : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kesmas (100%).

- d. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial
- Input** : Dana (Rp. 29.858.868,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 28.110.775,- (94.15%).
- Output** : Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial melalui seminar dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial dengan pejabat lintas sektor kab/kota (100%).
- e. Kegiatan Koordinasi dan Penanggulangan HIV dan AIDS
- Input** : Dana (Rp. 29.838.868,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 25.885.800,- (86.69%).
- Output** : Terlaksananya rapat koordinasi dengan stakeholders kabupaten kota se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerah (100%).

2. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama di padang (Sumatera Barat) (100%) meliputi:

- a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.
- Input** : Dana (Rp. 2.000.000.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 1.706.565.033,- (67.02%).
- Output** : Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan Embarkasi Haji di Padang dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya kualitas pelayanan Haji di Embarkasi Haji Padang (100%).

- b. Kegiatan Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 19.502.832.198,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 13.071.150.069,- (67.02%).

Output : terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya Sumatera Barat tahap ke- VIII dengan realisasi 100%.

Outcomes : Partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan Masjid Raya (100%).

- c. Kegiatan Biaya Operasional Masjid Raya Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 503.600.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 193.685.236,- (38.46%).

Output : Terselenggaranya pelayanan keamanan dan kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan ibadah serta kegiatan lainnya di masjid Raya Sumbar (100%).

3. Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai keagamaan di Sumatera Barat (100%) meliputi:

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian Didikan Subuh Tergiat se Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 117.908.056,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 117.007.912,- (99.24%).

Output : Terbinanya 19 lembaga Didikan Subuh di Kabupaten/Kota dan tersalurkannya bantuan untuk lembaga Didikan Subuh dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi binaan lembaga Didikan Subuh se Sumatera Barat (100%).

- b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan

- Input** : Dana (Rp. 505.573.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 453746256,- (89.75%).
- Output** : Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Mesjid yang ada di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya hubungan silaturahmi di Bulan Ramadhan di Mesjid-mesjid se Sumatera Barat (100%).
- c. Kegiatan Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur.
- Input** : Dana (Rp. 29.858.868,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 25.987.750,- (87.04%).
- Output** : Terselenggaranya wirid pengajian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama 48 minggu dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya ke Imanan dan ke Taqwaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (100%).
- d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.
- Input** : Dana (Rp. 26.872.981,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 21.086.250,- (78.47%).
- Output** : Terselenggaranya acara peringatan hari besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 4 kali kegiatan dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya pemahaman PNS terhadap makna hari-hari besar Islam (100%).
- e. Kegiatan Pelatihan Qori/ah, Mufasir/ah dan Hafiz/ah Sumatera Barat.
- Input** : Dana (Rp. 332.200.500,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 288.452.527,- (86.83%).

- Output** : Terselenggaranya pelatihan terhadap Kafilah potensial Sumatera Barat dengan 48 orang peserta, dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya prestasi calon-calon Kafilah pada event-event tingkat Nasional (100%).
- f. Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat Dalam Rangka STQ Nasional.
- Input** : Dana (Rp. 1.000.000.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 899.208.300,- (89.92%).
- Output** : Tersedianya persiapan dan pengiriman Kafilah Sumatera Barat ke ajang STQ Nasional dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya prestasi Sumatera Barat pada Ajang STQ Nasional (100%).
- g. Kegiatan Pelatihan Guru TPQ/MDT se Sumatera Barat.
- Input** : Dana (Rp. 191.484.850,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 185.536.648,- (96.89%).
- Output** : Terselenggaranya pelatihan terhadap Guru TPQ/MDT se Sumatera Barat dengan 70 orang peserta untuk di padang dan 40 orang peserta di Mentawai dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya motivasi guru TPQ/MDT untuk membina prestasi didik di daerah (100%).
- h. Kegiatan Musabaqah Qiraatil Khutub
- Input** : Dana (Rp. 961.543.500,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 791.699.555,- (82.34%).
- Output** : Terselenggaranya pengiriman kafilah sumbar ke event nasional MQK di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- Outcomes** : Meningkatnya Capaian kontingen MQK Sumbar (100%).

4. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat (100%) meliputi:

- a. Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi.

Input : Dana (Rp. 37.323.584,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 32.830.250,- (87.96%).

Output : Terselenggaranya pelatihan terhadap pengelola barang/uang pada rumah ibadah dan organisasi keagamaan se Sumatera Barat dengan 60 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kualitas pengelola barang/uang pada rumah ibadah-ibadah dan organisasi keagamaan se Sumatera Barat (100%).

- b. Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 64.196.565,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 51.135.400,- (79.65%).

Output : Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Mempercepat pembangunan bidang keagamaan di Sumbar (100%).

- c. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Alquran se Sumbar

Input : Dana (Rp. 94.716.135,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 58.348.250,- (61.60%).

Output : Terselenggaranya fasilitasi pembinaan kepada guru pondok Al Quran dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasinya binaan pondok alquran se Sumatera Barat (100%).

d. Kegiatan Koordinasi dan monitoring kegiatan imam masjid

Input : Dana (Rp. 55.537.494,-) terealisasi fisik 100% dan
Keuangan Rp. 53.532.100,- (96.39%).

Output : Terselenggaranya pelatihan kepada imam masjid se
Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya motivasi imam masjid untuk
membina umat islam di daerah (100%).

BAB IV

Penutup

Bab ini secara umum menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4.1 Kesimpulan

LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan realisasi program kegiatan bidang-bidang di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra.

Dengan demikian LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Program-program tersebut meliputi Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.

2. LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

4.2 Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2018

KEPALA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA

Drs. H. SYAHRIL, B. MM

Pembina Utama Muda,

Nip. 19580405 197903 1 005